

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal: *Hamemayu Hayuning Bawana* di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tomi Agus Triono¹

(1) Mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Islam Indonesia

Tomiagustriono87@gmail.com

Abstract: *Community Empowerment is an effort to enhance the independence and participation of society in the development process. In the Yogyakarta Special Region (DIY), community empowerment is one of the top priorities to achieve sustainable societal welfare. However, effective community empowerment strategies must be tailored to the local context and the potential possessed by the community. This conceptual research aims to explore a community empowerment framework rooted in local potential in DIY. Through a literature review and analysis of DIY's natural resources, cultural assets, and local wisdom, this paper proposes an integrated conceptual framework for community empowerment that synergizes with people-centered economic development, cultural preservation, and sustainable natural resource management. The framework emphasizes the importance of community participation, strengthening local capacities, and collaboration among the government, private sector, and communities in the empowerment process. By optimizing local potential, it is hoped that community empowerment in DIY can strengthen economic independence, preserve cultural identity, and maintain environmental sustainability in a balanced and sustainable manner.*

Keywords: *Community Empowerment, Local Potential, DIY, People-Centered Economic Development, Cultural Preservation, Sustainable Natural Resource Management*

Abstrak: Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu prioritas utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Namun, strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif harus disesuaikan dengan konteks lokal dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Penelitian konseptual ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi lokal di DIY. Melalui tinjauan literatur dan analisis terhadap potensi sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal di DIY, paper ini mengajukan kerangka konseptual pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi kerakyatan, pelestarian budaya, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas lokal, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam proses pemberdayaan. Dengan mengoptimalkan potensi lokal, diharapkan pemberdayaan masyarakat di DIY dapat memperkuat kemandirian ekonomi, melestarikan identitas budaya, dan menjaga kelestarian lingkungan secara seimbang dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Potensi Lokal, DIY, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pelestarian Budaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Article Information: Submitted: 2025-1-15; Revised 2025-1-20; Accepted: 2025-1- 31



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan [1], [2]. Konsep ini menjadi sangat penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang melimpah namun masih menghadapi tantangan kesenjangan dan kemiskinan [3]. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal merupakan strategi pembangunan yang menekankan pada penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan filosofi Jawa *Hamemayu Hayuning Bawana*, yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kehidupan sosial. Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan serta memperkuat nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan musyawarah.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alam, budaya, dan ekonomi [4]. Namun, masih terdapat kesenjangan pembangunan di wilayah ini, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota [5]. Oleh karena itu, pemerintah daerah DIY menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan [6].

Pemberdayaan masyarakat yang efektif harus disesuaikan dengan konteks lokal dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat [7]. DIY memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, seperti seni tradisional, filosofi hidup, dan sistem pertanian tradisional [8]. Selain itu, DIY juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata alam [9]. Potensi-potensi ini dapat menjadi modal berharga dalam upaya pemberdayaan masyarakat di DIY.

Beberapa penelitian telah mengeksplorasi konsep pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di berbagai wilayah. Study yang sudah dilakukan oleh banyak peneliti mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan kesejahteraan melalui Pertanian dan Pariwisata seperti pengelolaan tanaman obat-obatan agrowisata, dan kampung wisata [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17]. Penelitian lainnya mengkaji terkait pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pesisir [9], [18].

Namun, penelitian yang secara komprehensif mengeksplorasi konsep pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal secara berkelanjutan di DIY masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian konseptual ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengajukan kerangka konseptual pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi kerakyatan, pelestarian budaya, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di DIY.

Dengan mengoptimalkan potensi lokal, diharapkan pemberdayaan masyarakat di DIY dapat memperkuat kemandirian ekonomi, melestarikan identitas budaya, dan menjaga kelestarian lingkungan secara seimbang dan berkelanjutan. Penelitian konseptual ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan kontekstual di DIY.



METODE PENELITIAN

Penelitian konseptual ini bertujuan untuk merancang kerangka konseptual yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui optimalisasi potensi lokal. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur yang mendalam untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, seperti pemberdayaan masyarakat [19], potensi lokal, dan pembangunan berkelanjutan. Sumber data terdiri dari jurnal akademik, laporan kebijakan, serta studi kasus relevan yang membahas praktik pemberdayaan di berbagai daerah, termasuk DIY. Analisis dilakukan secara sistematis dengan pendekatan tematik guna memahami hubungan kompleks antara konsep-konsep tersebut dan bagaimana strategi pemberdayaan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks lokal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Potensi Lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki kekayaan potensi lokal yang beragam dan berharga. Analisis terhadap sumber-sumber data sekunder mengungkapkan potensi-potensi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rujukan Literatur Potensi Lokal di DIY

Tema	Penulis	Judul	Potensi
Sumber Daya Alam	Widyaputra & Setyaningrum, 202	Pola Pemanfaatan Lahan Pesisir Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Perikanan dan Pariwisata
	Harsana & Triwidayati, 2020	Potensi makanan tradisional sebagai daya tarik wisata kuliner di DI Yogyakarta	Pertanian
	Arrazy & Primadini, 2021	Potensi subsektor perikanan pada provinsi-provinsi di Indonesia	Perikanan
	Purwanto, Haryanti, and Raharjo 2020	Pariwisata dan Pertambangan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bribin, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Pariwisata
Budaya dan Kearifan Lokal	Siregar, 2020	Pendidikan Berbasis Budaya Jawa Dalam Masyarakat Yogyakarta	Seni Tradisional
	Hadi, 2018	Revitalisasi Tari Tradisional	Seni Tradisional
	Vitasurya et al., 2023;	Tinjauan Masterplan Sesar Opak Bukit Mengger Berbasis Pelestarian Objek Warisan Geologi	Filosofi Hamemayu Hayuning Buwana
	Wagiran, 2012	Pengembangan Karakter	Filosofi



Tema	Penulis	Judul	Potensi
		Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana (Identifikasi Nilai-Nilai Karakter Berbasis Budaya)	Hamemayu Hayuning Bawana
Potensi Ekonomi Kerakyatan	Senduk, 2022	Peran Ekonomi Kerakyatan	UMKM dan Ekonomi Kreatif
	Dinas Koprasi dan UMKM DIY, 2024	Markethub UMKM DIY	UMKM dan sektor industri
	Riswanto et al., 2023	EKONOMI KREATIF: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia	Industri seni, film, dan design
	Prayudi 2020;	Prospek Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Kulonprogo	Desa Wisata
	Purnomo et al. 2022	Pengembangan daya tarik obyek wisata Gunungjambu berbasis karifan lokal Gunungkidul	Desa Wisata

Sumber: Data sekunder diolah 2025

a. Sumber Daya Alam

DIY memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata alam [9]. Sebagian besar wilayah DIY merupakan lahan pertanian yang produktif, dengan komoditas utama seperti padi, sayuran, dan buah-buahan [4]. Selain itu, DIY juga memiliki potensi perikanan air tawar dan laut yang cukup besar [20]. Potensi pariwisata alam juga sangat menjanjikan, dengan adanya objek wisata alam seperti Gunung Merapi, Pantai Parangtritis, dan beberapa geopark [21].

b. Budaya dan Kearifan Lokal Sebagai pusat kebudayaan Jawa

DIY memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang unik dan bernilai tinggi. Seni tradisional seperti batik, wayang, tari, dan gamelan merupakan warisan budaya yang masih dijaga dan dilestarikan [22], [23]. Selain itu, DIY juga memiliki filosofi hidup dan kearifan lokal seperti konsep "Hamemayu Hayuning Bawana" (menjaga keselarasan alam) dan sistem pertanian tradisional yang ramah lingkungan [24], [25].

c. Potensi Ekonomi Kerakyatan

DIY memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang cukup besar, terutama dalam sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata berbasis masyarakat [26]. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di DIY sangat beragam, mulai dari industri kerajinan, makanan, dan fesyen [27]. Ekonomi kreatif juga berkembang pesat, seperti industri seni, film, dan desain [28]. Selain itu, konsep pariwisata



berbasis masyarakat juga semakin populer, dengan adanya desa-desa wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal [14][17].

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal “Hamemayu Hayuning Bawana” di DIY Berdasarkan tinjauan literatur dan analisis potensi lokal di DIY

Penelitian ini mengajukan kerangka konseptual pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan potensi lokal dengan filosofi “*Hamemayu Hayuning Bawana*” yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kehidupan sosial. Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan serta memperkuat nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan musyawarah sebagai berikut:

a. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal

Konsep ini menekankan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan fokus utama pada pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, serta pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang mengedepankan partisipasi aktif warga. Dalam konteks UMKM, upaya ini diwujudkan melalui dukungan teknis dan finansial untuk pelaku usaha yang mengolah produk pertanian lokal seperti gudeg, salak pondoh, atau olahan hasil pertanian lainnya, sehingga tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk tetapi juga membuka lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar daerah. Di sektor ekonomi kreatif, DIY memanfaatkan kekayaan budaya dan seni tradisionalnya seperti batik, kerajinan perak Kotagede, ukiran kayu, atau pertunjukan wayang kulit untuk menciptakan produk dan jasa inovatif yang kompetitif di pasar nasional maupun global, sekaligus melestarikan warisan budaya melalui pendekatan bisnis yang modern. Konsep ini didukung oleh study literatur yang pemberdayaan masyarakat dan Pendidikan inklusif di Kabupaten Bantul meningkatkan ekonomi lokal melalui penawaran inovatif dan kompetitif dalam ekonomi kreatif [29].

Sementara itu, di bidang pariwisata, konsep ini diimplementasikan dengan menggali potensi desa-desa wisata seperti Kasongan, Pentingsari, atau Penglipuran yang menonjolkan keunikan kearifan lokal, mulai dari arsitektur tradisional, ritual adat, hingga kuliner khas, sehingga menarik minat wisatawan sekaligus memastikan manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lokal menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang mendukung, termasuk pelatihan manajemen, akses pemasaran digital, dan infrastruktur pendukung, demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan, dan berbasis identitas budaya DIY yang kuat. Hal ini didukung penelitian sebelumnya bahwa menekankan pengembangan strategi promosi di desa pariwisata dan perlunya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan pariwisata dan memastikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat [30].

b. Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal



Konsep Pemberdayaan Masyarakat mengintegrasikan aspek budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi utama dalam proses pemberdayaan, dengan prinsip bahwa pembangunan manusia harus selaras dengan nilai-nilai sosial-budaya yang hidup di masyarakat. Integrasi ini dilakukan melalui tiga pendekatan strategis: pertama, pelestarian warisan budaya tidak hanya sebagai simbol identitas, tetapi sebagai sumber daya ekonomi dan pendidikan. Misalnya, di Yogyakarta, pelatihan membatik atau menenun bagi generasi muda tidak hanya bertujuan melestarikan teknik tradisional, tetapi juga membuka peluang usaha berbasis seni budaya. Kedua, kearifan lokal diterapkan sebagai panduan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti sistem *ngarambet* (pengelolaan air berbasis komunitas) atau praktik pertanian organik yang diwariskan turun-temurun, yang menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan ketahanan pangan. Ketiga, pendidikan dan pelatihan dirancang secara partisipatif dengan melibatkan tokoh adat, seniman, dan praktisi lokal, sehingga materi yang diajarkan tidak sekadar teori, tetapi terkait langsung dengan konteks kehidupan sehari-hari. Konsep ini sejalan dengan studi yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan kearifan lokal untuk praktik lingkungan yang berkelanjutan, menekankan kerja sama timbal balik, nilai-nilai spiritual, yang dapat meningkatkan identitas dan peluang ekonomi dalam masyarakat [31].

Proses pemberdayaan ini juga memperkuat kolaborasi antar-pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah yang menyediakan regulasi pendukung, akademisi yang mengkaji kearifan lokal untuk diadaptasi ke metode modern, serta komunitas yang menjadi pelaku utama. Di tingkat praktis, hal ini tercermin dalam pembangunan desa adat yang memadukan arsitektur tradisional Jawa dengan infrastruktur ramah lingkungan, atau revitalisasi ritual budaya seperti *Sekaten* dan *Labuhan* sebagai daya tarik wisata yang mendatangkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan makna spiritualnya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi, tetapi juga memperkuat jati diri kolektif, memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak tercerabut dari akar budaya, melainkan tumbuh organik dari nilai-nilai yang telah mengakar dan dihidupi oleh masyarakat sendiri. Penelitian yang sejalan dengan proses ini menjelaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat meningkatkan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, mengintegrasikan pengetahuan dan nilai-nilai lokal ke dalam praktik berkelanjutan [32].

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem serta kelangsungan hidup generasi mendatang. Dalam praktiknya, pendekatan ini mengutamakan pemanfaatan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam setiap tahap pengelolaan. Contohnya, dalam sektor pertanian, penerapan metode pertanian organik dan sistem pertanian tradisional yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya serta meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Konsep ini mendukung studi yang menjelaskan bahwa menekankan mengadopsi teknologi



dan praktik yang berkelanjutan, seperti pertanian cerdas dan energi terbarukan, untuk mengoptimalkan sumber daya alam, dan memastikan ekosistem [33].

Selain itu, dalam bidang pariwisata, pengelolaan destinasi alam secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan membatasi jumlah wisatawan, menerapkan regulasi ketat terhadap aktivitas yang dapat merusak lingkungan, serta memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam industri pariwisata berbasis ekowisata. Tidak hanya itu, upaya konservasi dan pelestarian ekosistem alam, seperti hutan hujan tropis, wilayah pesisir, serta sumber daya air, juga menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan guna menjaga keseimbangan biodiversitas dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim [30].

d. Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Lokal

Konsep ini menekankan pada pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap proses pemberdayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat melalui berbagai upaya, seperti pendidikan berbasis keterampilan, pelatihan teknis yang relevan dengan kebutuhan lokal, serta pendampingan yang berkelanjutan, menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan program pemberdayaan.

Dengan adanya dukungan yang berkesinambungan, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya yang ada, mengambil keputusan secara mandiri, serta menciptakan inovasi yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi setempat. Tujuan akhir dari pendekatan ini adalah membangun kemandirian masyarakat, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan eksternal, serta menciptakan keberlanjutan program pemberdayaan yang mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang, sejalan dengan prinsip pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Maka hal ini dalam menekankan perlunya strategi inklusif dalam perencanaan Pembangunan, menyoroti bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk proses pengawasan yang efektif. Memperkuat kapasitas masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterlibatan [34].

e. Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat

Konsep ini menekankan pada pentingnya kolaborasi dan sinergi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam setiap tahap proses pemberdayaan guna menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan, regulasi, serta menyediakan program dan dukungan infrastruktur yang mendukung terciptanya ekosistem pemberdayaan yang kondusif. Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi, penciptaan peluang usaha, penyediaan teknologi, serta pengembangan program kemitraan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inklusi sosial.

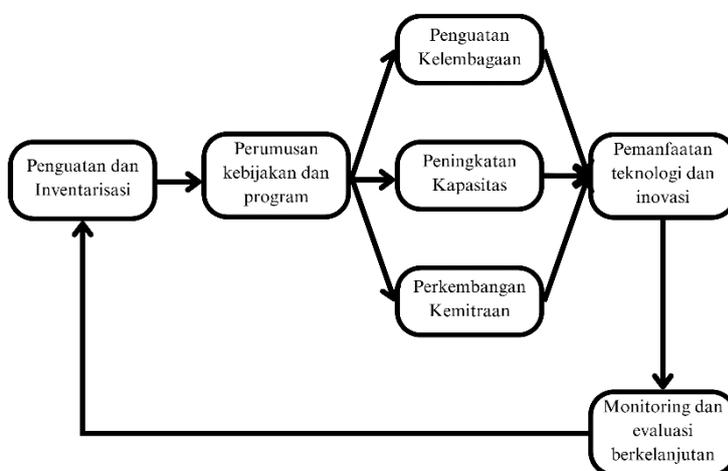
Masyarakat sebagai penerima manfaat utama diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi, sehingga keberlanjutan program dapat terjaga dan selaras dengan kebutuhan serta potensi lokal. Dengan adanya sinergi yang



baik di antara ketiga pilar ini, diharapkan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, menciptakan kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Kolaborasi lintas sektor yang sukses dalam infrastruktur energi melakukan tata Kelola adaptif, pembagian risiko, dan integrasi masyarakat, menyoroti peran strategis pemerintah, investasi sektor swasta, dan partisipasi publik aktif untuk meningkatkan keberlanjutan dan menyelaraskan dengan kebutuhan lokal di pasar negara berkembang salah satunya adalah Indonesia [35].

C. Implementasi Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

Untuk mengimplementasikan konsep pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal secara berkelanjutan di DIY, diperlukan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:



Gambar 1. Konsep Pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal

a. Pemetaan dan Inventarisasi Potensi Lokal

Langkah awal ini bertujuan mengidentifikasi sumber daya unggulan di seluruh wilayah melalui pendekatan partisipatif, seperti melibatkan masyarakat dalam pemetaan potensi alam, budaya, dan ekonomi. Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) digunakan untuk menggali data langsung dari pelaku lokal, sementara teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS) membantu memvisualisasikan potensi dalam bentuk peta tematik digital. Survei kuantitatif dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan tokoh masyarakat juga dilakukan untuk melengkapi data statistik ekonomi dan kearifan lokal. Hasil akhirnya berupa database terstruktur yang mencakup daftar komoditas unggulan, kluster UMKM, serta peta distribusi potensi, yang menjadi dasar perencanaan program pemberdayaan berbasis spesifikasi wilayah.

b. Perumusan Kebijakan dan Program yang Kontekstual

Berdasarkan data potensi yang terkumpul, pemerintah daerah merancang kebijakan dan program yang disesuaikan dengan karakteristik unik setiap wilayah. Kebijakan ini dapat berupa regulasi khusus untuk mendukung pengembangan sektor prioritas, seperti pariwisata berkelanjutan atau ekonomi kreatif. Program terintegrasi dirancang untuk mengoptimalkan potensi lokal,



misalnya inisiatif pengembangan pertanian lahan kering atau pemberdayaan industri kreatif. Alokasi anggaran responsif melalui APBD atau dana desa difokuskan pada pelatihan teknis, pengadaan infrastruktur pendukung, atau insentif bagi pelaku usaha, sehingga program dapat diimplementasikan secara efektif sesuai kebutuhan spesifik masyarakat.

c. Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Penguatan kelembagaan difokuskan pada peningkatan kapasitas organisasi masyarakat, seperti kelompok tani, koperasi, atau UMKM, agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri. Pendampingan manajemen organisasi diberikan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, termasuk pelatihan administrasi, perencanaan bisnis, dan sistem evaluasi. Pemerintah juga memfasilitasi akses permodalan melalui skema kredit usaha atau dana bergulir, serta membantu proses legalisasi usaha seperti perizinan dan sertifikasi. Dengan kelembagaan yang solid, partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan menjadi lebih terstruktur, transparan, dan berkelanjutan.

d. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Program peningkatan kapasitas dirancang untuk mengembangkan keterampilan teknis dan manajerial masyarakat sesuai potensi lokal. Pelatihan pertanian berkelanjutan, pengolahan produk bernilai tambah, atau digital marketing diberikan kepada pelaku usaha. Pendidikan non-formal seperti sekolah lapang atau kelas kreatif juga diselenggarakan untuk mendorong inovasi. Kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan profesional membantu menyinergikan pengetahuan akademis dengan praktik lokal, sehingga masyarakat mampu mengoptimalkan sumber daya dengan pendekatan modern tanpa meninggalkan kearifan tradisional.

e. Pengembangan Kemitraan

Kemitraan multidimensi melibatkan pemerintah, swasta, LSM, akademisi, dan masyarakat dalam kerangka kolaborasi yang saling menguntungkan. Skema Public-Private Partnership (PPP) memungkinkan pembagian peran dalam penyediaan infrastruktur, pendanaan, atau pendampingan teknis. Perusahaan swasta dapat berkontribusi melalui program CSR untuk pengembangan UMKM atau pelestarian budaya, sementara akademisi menyediakan riset terapan dan inovasi teknologi. Forum kolaborasi antar-pihak dibentuk untuk memastikan koordinasi, menghindari tumpang tindih program, serta menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan pemberdayaan.

f. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Teknologi dimanfaatkan untuk memperluas skala dan efisiensi program pemberdayaan. Digitalisasi UMKM melalui platform e-commerce membantu pemasaran produk lokal ke pasar nasional maupun global. Inovasi teknologi hijau, seperti sistem irigasi cerdas atau pengolahan limbah terpadu, diterapkan untuk mendukung sektor pertanian dan kerajinan ramah lingkungan. Aplikasi berbasis masyarakat juga dikembangkan untuk mempromosikan wisata budaya atau memudahkan akses informasi pelatihan. Dengan integrasi teknologi, program pemberdayaan menjadi lebih adaptif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan pasar.



g. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Proses ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata. Indikator kinerja yang terukur, seperti peningkatan pendapatan masyarakat atau pertumbuhan UMKM, digunakan sebagai acuan evaluasi. Pelibatan masyarakat dalam musyawarah evaluasi membantu mengidentifikasi kendala lapangan dan kebutuhan perbaikan. Sistem pelaporan digital memungkinkan pemantauan real-time dan analisis data untuk pengambilan keputusan yang cepat. Hasil evaluasi menjadi dasar replikasi program sukses ke wilayah lain atau penyesuaian strategi untuk meningkatkan efektivitas ke depannya.

SIMPULAN

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki kekayaan potensi lokal yang melimpah, baik dari sumber daya alam, budaya, maupun ekonomi kerakyatan. Penelitian ini mengajukan konsep pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan potensi lokal tersebut, meliputi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, pelestarian budaya dan kearifan lokal, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, partisipasi dan penguatan kapasitas masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Konsep ini menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi lokal DIY sebagai basis pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat mencapai keseimbangan antara peningkatan kemandirian ekonomi, pelestarian identitas budaya, dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan konsep filosofi dari *Hamemayu Hayuning Bawana*. Implementasi konsep ini memerlukan strategi seperti pemetaan potensi lokal, perumusan kebijakan kontekstual, penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas, pengembangan kemitraan, pemanfaatan teknologi, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Dengan mengoptimalkan potensi lokal melalui konsep pemberdayaan masyarakat yang diajukan, diharapkan DIY dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik dan berkelanjutan. Sesuai dengan filosofi yang dimiliki yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*. Penelitian ini memberikan kerangka konseptual yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang efektif dan kontekstual di DIY dalam konteks *Hamemayu Hayuning Bawana*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Ife and F. Tesoriero, "Community development: Alternative community development in the era of globalization," *Yogyakarta Publ. Student Libr.*, 2008.
- [2] A. D. Amalia and M. Syawie, "Pembangunan Kemandirian Desa melalui konsep pemberdayaan: Suatu Kajian dalam perspektif sosiologi," *Sosio Inf. Kaji. Permasalahan Sos. Dan Usaha Kesejaht. Sos.*, vol. 1, no. 2, 2015.
- [3] United Nations Development Programme, *Human development report 2020*. 2020. [Online]. Available: <https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf>
- [4] M. Harsana and M. Triwidayati, "Potensi makanan tradisional sebagai daya tarik wisata kuliner di DI Yogyakarta," *Pros. Pendidik. Tek. Boga Busana*, vol. 15, no. 1,



- 2020.
- [5] BPS, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022,” *Badan Pus. Stat.*, no. 51, pp. 1–16, 2022.
 - [6] D. Wahyuni, “Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul,” *J. Masal. Sos.*, vol. 9, no. 1, pp. 83–100, 2018.
 - [7] T. Mardikanto and P. Soebiato, “People’s Empowerment.” Revise edition. ALFABETA. Bandung, 2015.
 - [8] A. Kurniawan and M. I. Sadali, *Keistimewaan Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta*. UGM PRESS, 2018.
 - [9] P. K. Widyaputra and A. Setyaningrum, “POLA PEMANFAATAN LAHAN PESISIR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR DI BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,” *Public Sphere J. Sos. Polit. Pemerintah. dan Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–9, 2024.
 - [10] Y. Yuliana, “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENDUKUNG EKONOMI KELUARGA,” *Amaliah J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 237–241, 2018.
 - [11] R. Istiana, Y. Eva, R. Y. Dina, A. Rahmawati, and J. M. Amir, “Studi Kelayakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Bulak Salak, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY,” 2018.
 - [12] S. Sriyadi, “Model Pengembangan Agrowisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus di Desa Kebon Agung Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul DIY),” *Agrar. J. Agribus. Rural Dev. Res.*, vol. 2, no. 2, pp. 152–160, 2016.
 - [13] R. T. Wahyuhana, E. Tisnawati, and J. Trimarstuti, “Pengembangan kapasitas masyarakat melalui manajemen Kampung Wisata Brontokusuman, Yogyakarta berbasis kearifan lokal,” *Community Empower.*, vol. 6, no. 12, pp. 2257–2264, 2021.
 - [14] M. A. Prayudi, “Prospek Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Kulonprogo,” *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, vol. 11, no. 1, pp. 27–32, 2020.
 - [15] S. Sukmadi, F. Kasim, V. Simatupang, A. D. L. Goeltom, and I. Saftara, “Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal pada Desa Wisata Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta,” *Masy. Pariwisata J. Community Serv. Tour.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2020.
 - [16] P. Arifin and N. N. Ardiansyah, “Penerapan Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Yogyakarta,” *J. Nomosleca*, vol. 6, no. 1, 2020.
 - [17] S. Purnomo, D. Ratnawati, N. Arifin, and S. Setuju, “Pengembangan daya tarik obyek wisata Gunungjambu berbasis karifan lokal Gunungkidul,” in *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2022, pp. 408–414.
 - [18] E. Y. Setyawati, “Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir Berdasarkan Kearifan Lokal,” 2014.



- [19] A. Anggito and J. Setiawan, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Sukabumi: SUKABUMI : CV Jejak, 2018.
- [20] M. Arrazy and R. Primadini, “Potensi subsektor perikanan pada provinsi-provinsi di Indonesia,” *J. Bina Bangsa Ekon.*, vol. 14, no. 1, pp. 1–13, 2021.
- [21] Purwanto, N. Haryanti, and S. A. S. Raharjo, “Pariwisata dan Pertambangan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bribin, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta,” 2020.
- [22] J. S. Siregar, “Pendidikan Berbasis Budaya Jawa Dalam Masyarakat Yogyakarta,” *IKRA-ITH Hum. J. Sos. dan Hum.*, vol. 4, no. 3, pp. 1–10, 2020.
- [23] Y. S. Hadi, *Revitalisasi Tari Tradisional*. Dwi-Quantum, 2018.
- [24] V. R. Vitasurya, A. Pudianti, and L. A. Rudwiarti, “TINJAUAN MASTERPLAN SESAR OPAK BUKIT MENGER BERBASIS PELESTARIAN OBJEK WARISAN GEOLOGI,” *Share J. Serv. Learn.*, vol. 9, no. 1, pp. 65–74, 2023.
- [25] W. Wagiran, “Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana (Identifikasi Nilai-Nilai Karakter Berbasis Budaya),” *J. Pendidik. Karakter*, vol. 3, no. 3, 2012.
- [26] F. F. W. Senduk, “Peran Ekonomi Kerakyatan,” *Eksistensi Ekon. Kerakyatan di Indones.*, vol. 1, p. 97, 2022.
- [27] Dinas Koperasi dan UMKM DIY, “Markethub UMKM DIY,” sibakuljogja.jogjaprov.go.id. Accessed: Jun. 24, 2024. [Online]. Available: <https://sibakuljogja.jogjaprov.go.id/>
- [28] A. Riswanto *et al.*, *EKONOMI KREATIF: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [29] I. Rahman and L. M. Hakim, “Development of Creative Economy Based on Local Wisdom in the Era of Digital Transformation Through Inclusive Education and Village Community Empowerment in Bantul Regency, Yogyakarta,” *BASKARA J. Bus. Entrep.*, vol. 6, no. 2, pp. 184–195, 2024.
- [30] A. R. Sudrajat, F. Febianti, and D. W. N. Ningrum, “Tourism Village Promotion Strategy in Developing Tourism Villages Based on Local Wisdom in Sumedang District”.
- [31] A. Pratama *et al.*, “From Tradition to Action: The Potential of Community Empowerment Through Local Wisdom for Sustainable Environmental Protection Practices,” *Eurasia Proc. Educ. Soc. Sci.*, vol. 35, pp. 271–282, 2024.
- [32] D. Dushkova and O. Ivlieva, “Empowering communities to act for a change: A review of the community empowerment programs towards sustainability and resilience,” *Sustainability*, vol. 16, no. 19, p. 8700, 2024.
- [33] R. Jha and A. Sharma, “Adoption of Agricultural Resources for Sustainable Environment,” in *Building Inclusive Global Knowledge Societies for Sustainable Development*, IGI Global Scientific Publishing, 2025, pp. 29–42.
- [34] A. Ghufron and I. F. Agustina, “Community Engagement in Development Planning in Jabon District,” *Indones. J. Cult. Community Dev.*, vol. 15, no. 3, pp. 10–21070, 2024.



- [35] W. A. Owoola, B. A. Olaniyo, O. D. Obeka, A. O. Ifeanyi, O. B. Ige, and S. F. Bello, “Cross-Sector collaboration in energy infrastructure development: New models for public-private partnerships in emerging markets,” 2024.

